



Daftar Pertanyaan Wawancara

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

- a. Bagaimanakah mekanisme perencanaan kebutuhan dan penganggaran aset tetap yang dilakukan oleh Dinas PUPR?

Jawab : jadi mekanisme pelaksanaannya itu Dinas PUPR sebagai pengguna barang terlebih dahulu menyusun kebutuhan barang dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PUPR.

Kasi perencanaan dan kepegawaian menyampaikan usulan dari masing-masing bidang untuk diakomodasi dan selanjutnya dilakukan penyusunan RKA menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Perencanaan, kemudian direalisasi sesuai bulan yang tertera dalam rencana anggaran kas.

- b. Apakah dalam penyusunan perencanaan, kebutuhan dan penganggaran aset tetap sudah sesuai dengan standarisasi yang berlaku?

Jawab : Iya sudah sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 yang berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan standar harga.

2. Pengadaan

- a. Dari segi pengadaan aset tetap, apakah pelaksanaannya berpedoman pada daftar kebutuhan barang daerah?

Jawab : iya pengadaan di Dinas PUPR dilakukan berpedoman pada daftar kebutuhan barang dengan prinsip efektif, efisien, transparan, adil dan akuntabel.

b. Bagaimana pelaksanaan pengadaan aset tetap pada Dinas PUPR?

Jawab : Pengadaan barang disini dilakukan melalui swakelola dan pemilihan penyedia. Swakelola itu cara memperoleh barang yang disediakan sendiri oleh lembaga. Sedangkan pemilihan penyedia itu cara memperoleh barang yang disediakan oleh pelaku usaha. Selanjutnya pengguna barang setelah melakukan pengadaan barang harus menyampaikan laporan hasil pengadaan barang milik daerah kepada Walikota melalui pengelola barang untuk ditetapkan status penggunaannya

3. Penggunaan

Apakah bidang aset menerbitkan SK penetapan untuk mengatur penggunaan aset tetap kepada masing-masing SKPD dan bagaimana status penggunaannya

Jawab : Iya, Dinas PUPR menetapkan status penggunaan barang milik daerah untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD dan dapat digunakan oleh pihak lain dalam upaya mendukung pelayanan umum sesuai fungsi dan tugas pokok SKPD yang bersangkutan. Penetapan status penggunaan barang milik daerah Dinas PUPR pengguna barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan

perolehan lainnya yang sah kepada Walikota. Pengajuan permohonan tersebut dilakukan setelah diterimanya barang milik daerah berdasarkan dokumen penerimaan barang pada tahun anggaran yang berkenaan. Permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah diajukan secara tertulis dari pengguna barang kepada Walikota paling lambat pada akhir tahun berkenaan. Kemudian Walikota menerbitkan keputusan penetapan status penggunaan barang milik daerah setiap tahun.

4. Pemanfaatan

- a. Bentuk pemanfaatan seperti apa yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya?

Jawab : Nah.. jadi pemanfaatan itu kan memanfaatkan barang milik daerah yang tidak digunakan sesuai tugas dan fungsi SKPD. Untuk bentuk pemanfaatan yang dilakukan disini itu dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, Bangun serah guna atau Bangun guna serah, dan kerjasama penyediaan infrastruktur.

- b. Dilihat dari segi biaya pemeliharaan, apakah pemanfaatan tersebut tidak membebani APBD?

Jawab : Tidak, karena kan dilihat dari segi prioritas kebutuhan jadi tidak membebani APBD

5. Pengamanan dan Pemeliharaan

- a. Bagaimanakah sistem pengamanan yang dilakukan oleh Dinas PUPR dalam mengelola aset tetapnya dan pengamanan dalam bentuk seperti apa?

Jawab : Jadi pengamanan yang dilakukan disini ada dua jenis yaitu pengamanan fisik dan pengamanan administrasi. Pengamanan fisik dilakukan dengan memasang tanda kepemilikan serta pemagaran. Sedangkan pengamanan administrasi dilakukan dengan mencatat dan menyimpan dokumen bukti kepemilikan aset secara aman dan tertib terhadap barang inventaris dalam proses pemakaian.

- b. Apakah Dinas PUPR mencatat proses pemeliharaan aset tetap ke dalam kartu pemeliharaan dan membuat laporannya dilingkungan SKPD?

Jawab : Iya, mencatat proses pemeliharaan dan membuat laporan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

6. Penilaian

Bagaimanakah mekanisme penilaian aset tetap yang dilakukan oleh bidang aset?

Jawab : Penilaian aset tetap itu dilakukan untuk penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan dan pemindahtangan barang milik daerah. Penilaian tersebut dilakukan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di Dinas PUPR dilakukan prosedur penyusunan neraca penilaian mengenai berapa

jumlah aset serta nilai dari aset tersebut agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menetapkan anggaran setiap tahunnya. Penyusunan neraca berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

7. Pemindahtanganan

- a. Apakah proses pemindahtanganan barang milik daerah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bagaimana proses pemindahtanganan di Dinas PUPR ?

Jawab : Pemindahtanganan dilakukan dengan dihibahkan, penjualan dan tukar-menukar. Dalam upaya pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan penilaian. Yang dilakukan penilaian hanya penjualan dan tukar-menukar saja, sedangkan untuk hibah tidak perlu dilakukan penilaian. Nah, Penilaian pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan untuk mendapatkan nilai wajar. Pemindahtanganan ini telah dilakukan berpedoman pada Permendagri No. 19 Tahun 2016

8. Pemusnahan

- a. Bagaimanakah cara pemusnahan barang milik daerah? Dalam kondisi apa hal tersebut dilakukan?

Jawab : Nah.. untuk cara pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun dan cara lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Pemusnahan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Walikota. Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila barang tersebut tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, tidak dapat

dipindahtangankan atau terdapat alasan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

9. Penghapusan

- a. Dari segi penghapusan barang milik daerah, apakah pengguna barang mengusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan? Jika demikian, biasanya dalam kondisi apa hal ini dilakukan ?

Jawab : iya betul, jadi pelaksanaan penghapusan barang milik daerah disini pengguna barang mengusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan. Penghapusan tersebut disebabkan karena barang milik daerah sudah tidak dapat dipergunakan atau kondisi yang telah rusak, pemindahtanganan atas barang milik daerah, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, menjalankan ketentuan undang-undang, penyerahan barang milik daerah, pemusnahan dan sebab lain yang perlu dilakukan penghapusan

10. Penatausahaan

- a. Bagaimana mekanisme pelaksanaan penatausahaan aset tetap yang dilakukan di Dinas PUPR?

Jawab : Penatausahaan aset dikakukan dengan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Pembukuan itu kegiatan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam daftar barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Inventarisasi itu kegiatan melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.

Sedangkan Pelaporan itu tindakan penyampaian data dan informasi yang dilaksanakan oleh unit pelaksana penatausahaan. Pelaporan dilakukan semesteran dan tahunan yang digunakan untuk menyusun neraca.

11. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

- a. Bagaimanakah bentuk pembinaan yang dilakukan oleh kepala daerah dalam mengelola aset tetapnya? Apakah sesuai dengan uraian tugas dan wewenangnya?

Jawab : Pembinaan barang milik daerah pada Dinas PUPR dilakukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan wewenangnya dengan memberikan pedoman, pelatihan, supervise dan rapat sosialisasi yang menyangkut pengelolaan barang milik daerah termasuk penatausahaan barang milik daerah.

- b. Seperti apa sistem pengawasan dan pengendalian yang dilakukan Dinas PUPR, apakah sudah sesuai dengan tujuan awal yang ingin dicapai?

Jawab : Kalau untuk pengawasan dan pengendalian barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR dilakukan oleh pengguna dan kuasa pengguna barang melalui pemantauan dan penertiban barang milik daerah

12. Pengelolaan BMD pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan BLUD

- a. Bagaimana pengelolaan BMD pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan BLUD ?

Jawab : ini sepertinya baru ya dalam permendagri karena yang sebelumnya belum ada, Jadi saya belum terlalu mengerti untuk tahapan ini. Disini tidak ada barang daerah yang pengelolaannya menggunakan ini. Ini seperti rumah sakit kan yang asetnya dibawah kewenangan pengelolaan SKPD yang pengelolaannya melalui BLUD, memang asetnya didapat dari APBD tetapi mereka memiliki kewenangan sendiri dalam mengelola asetnya.

13. Barang milik daerah berupa rumah Negara

- a. Apakah di Dinas PUPR terdapat pengelolaan barang milik daerah berupa rumah negara?

Jawab : Untuk tahapan ini pegawai di Dinas PUPR dalam pelaksanaan tugasnya tidak terdapat rumah negara. Karena kan, rumah negara itu dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut dan untuk hak penghuninya juga terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut. Jadi di Dinas PUPR tidak terdapat rumah negara.

14. Ganti rugi dan sanksi

- a. Bagaimana penerapan ganti rugi atas aset daerah akibat kelalaian dan penyalahgunaan maupun pelanggaran hukum dalam pengelolaan aset Dinas PUPR?

Jawab : ya, jadi disini untuk siklus ganti rugi dan sanksi sudah dilaksanakan terhadap pengguna barang akibat kelalaian, penyalahgunaan maupun pelanggaran hukum yang merugikan daerah. Tahap ini berpedoman pada Permendagri No. 19 Tahun 2016 yang mengatakan setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



SURAT IZIN PENELITIAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO FAKULTAS EKONOMI

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia
Telp (0352) 481124, Fax (0352) 461796, e-mail : akademika@umpo.ac.id Web: www.umpo.ac.id
Akreditasi Institusi B oleh BAN-PT
(SK Nomor : 77/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)

Nomor : 788/TV.4/PN/2021
Hal : Ijin Penelitian

Ponorogo, 15 Juni 2021

Kepada :

Yth. Kepala Bakesbangpol Kota Madiun
Jl. Mayor Jend. DI Panjaitan No. 17,
Banjarejo, Kec. Taman, Kota Madiun, Jawa Timur

Assalaamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SLAMET SANTOSO, SE, M.Si
NIK : 19701016 199904 12
Jabatan : Wakil Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : IDA NUR KAYATI
NIM : 18430476
Semester : VI (Enam)
Jurusan : D3 Akuntansi
No. HP : 082245729227
Lokasi/Objek : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun
Lama Penelitian : 1 Bulan
Bidang : Akuntansi Pengantar II
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dalam hal ini mohon diberi kesempatan untuk mengadakan penelitian pada Instansi/Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin guna melaksanakan tugas skripsi.


Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wr. wb.

Wakil Dekan,

SLAMET SANTOSO, SE, M.Si
NIK. 19701016 199904 12

SURAT REKOMENDASI BANKESBANG MADIUN



PEMERINTAH KOTA MADIUN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Gedung Krida Praja Lt III, Jl. D.I. Panjaitan No. 17 Kota Madiun 63137
 Telepon : (0351) 462153 Faximili (0351) 462153
 Website : <http://www.madiun.kota.go.id>

REKOMENDASI PENELITIAN
 Nomor : 070/ *734* /401.205/2021

Dasar : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;
 b. Peraturan Walikota Madiun Nomor : 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Memperhatikan : Surat Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo tanggal 15 Juni 2021 Nomor : 788/IV.4/PN/2021 Perihal Ijin Penelitian.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun, memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : IDA NUR KAYATI
 Tempat/tgl. Lahir : MADIUN, 24 MEI 1999
 Alamat : DESA BULU RT. 014 RW. 002 KECAMATAN PILANGKENCENG KABUPATEN MADIUN (HP. 0822 4572 9227)

Judul penelitian : Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun

Tujuan penelitian : Untuk Mengetahui Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun


Tempat penelitian : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun
 Waktu penelitian : 1 (satu) bulan
 Bidang penelitian : Lain-Lain
 Status penelitian : Dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Anggota peneliti : -

Dengan ketentuan : 1. Peneliti menaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat ;
 2. Peneliti memberikan laporan hasil penelitian dalam bentuk 1 (satu) buku Kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun yang menerbitkan Rekomendasi Penelitian ;
 3. Peneliti apabila melakukan penelitian tidak sesuai dengan permohonan dan proposal yang diajukan, akan dikenakan sanksi berupa pencabutan Rekomendasi/tidakberlaku.
 4. Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Madiun, 23 Juni 2021



**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KOTA MADIUN**

TJATOER WAHJODIANTO, S. Sos
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19671010 198903 1 013

Tembusan :
 Yth. 1. Bp. Walikota Madiun
 (sebagai laporan) ;
 2. Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi UnmuH Ponorogo.

LEMBAR BIMBINGAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO FAKULTAS EKONOMI

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia
Telp (0352) 481124, Fax. (0352) 461796, e-mail : akademik@umpo.ac.id Website :www.umpo.ac.id
Akreditasi Institusi B oleh BAN-PT
(SK Nomor : 77/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : **IDA NUR KAYATI**
2. NIM : 18430476
3. Jurusan : D3 Akuntansi
4. Bidang : Pengantar Akuntansi II
5. Alamat : Ds. Bulu, RT.14/RW.02, Kec. Pilangkeceng, Kab. Madiun
6. Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun
7. Masa Pembimbingan : Februari 2021 s/d Januari 2022
8. Tanggal Mengajukan Skripsi : 02 Mei 2021
9. Konsultasi : -

Tanggal Disetujui	BAB	Paraf Pembimbing
02 - Juni - 2021	Bimbingan Proposal	<i>[Signature]</i>
07 - Juni - 2021	Revisi proposal Latar belakang dan Metode penelitian	<i>[Signature]</i>
09 - Juni - 2021	Revisi Proposal Latar belakang	<i>[Signature]</i>
14 - Juni - 2021	Acc Proposal	<i>[Signature]</i>
15 - Juni - 2021	Bimbingan BAB 1,2,3	<i>[Signature]</i>
16 - Juni - 2021	Revisi BAB 1,2,3	<i>[Signature]</i>
17 - Juni - 2021	Revisi Kerangka Pemikiran dan Definisi Operasional Variabel	<i>[Signature]</i>
18 - Juni - 2021	Acc BAB 1,2,3	<i>[Signature]</i>
02 - Juli - 2021	Bimbingan BAB 4 dan 5	<i>[Signature]</i>
07 - Juli - 2021	Revisi BAB 4 dan 5	<i>[Signature]</i>
13 - Juli - 2021	Revisi BAB 4 Hasil penelitian	<i>[Signature]</i>
14 - Juli - 2021	Revisi BAB 4 Pembahasan siklus Pengelolaan Aset Tetap	<i>[Signature]</i>

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dan pengecekan dokumen sumber dengan staf sekretariat bidang aset



Pengecekan dokumen sumber dengan staf sekretariat bidang aset 2

DOKUMEN SUMBER

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2020		Formule RKA-RINCIAN BELANJA IKPD				
Urutan Pemerintahan : 1.03 URUSAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN MASYARAKAT Unit Organisasi : 1.03.0100.00.001.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Unit Organisasi : 1.03.0100.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program : 1.03.01.2.02 PROGRAM PENYANGGUNG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Kegiatan : 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang/Mula Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum Dana Abchal Umum Lokasi Kegiatan : Kota Medan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Kelompok Saran : Rp. 0 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 100.000.000						
Indikator : Indikator & Toak Ukur Kinerja Kegiatan						
Capaian Kegiatan : Toak Ukur Kinerja						
Mawalan : Dana yang dibuduhikan						
Keluaran : Jumlah Sarana yang Terpenuhi						
Hasil :						
Melompok Saran Kegiatan : ASN Dinas PUTRI Kota Medan						
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Abchal Umum						
Lokasi : Kota Medan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : Presentase Jumlah Saran yang Terpenuhi						
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
		Koefisien				
5	BELANJA DAERAH					Rp. 89.417.995

Dokumen RKA (Rencana Kerja dan Anggaran)

PROVINSI JAWA TIMUR
 KABUPATEN KARUWATI
 BINA WILAYAH
 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 12-13-2018 08:01:01

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG TANAH ATMAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
No	Uraian	Tahun Pengadaan	No. Nama Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M ²)	Letak/Alokasi	Sertifikat	Penggunaan	Asal/luar	Harga (Rp)	Keterangan
1	Tanah Bangunan	01.01.11.07.03	0001	6.765,00	2006	A. Lahan Pertanian No.17	Hak Pakai	2203/2005	38	Gedung Baurama	Pondok
2	Tanah Bangunan	01.01.11.07.03	0001	18.726,00	2002	Kel. Sauran	Hak Pakai			Sauran Gemil Mendan	Kebak
3	Tanah Bangunan	01.01.11.07.03	0003	8.660,00	2002	Kel. Sauran	Hak Pakai			Sauran Sanyubi	Kebak
4	Tanah Bangunan	01.01.11.07.03	0003	2.375,40	2002	Kel. Sauran	Hak Pakai			Sauran Padi Lima	Kebak
5	Tanah Bangunan	01.01.11.07.03	0004	11.660,00	2002	Kel. Sauran	Hak Pakai			Sauran Ronggo	Kebak
6	Tanah Bangunan	01.01.11.07.03	0005	14.080,00	2002	Kel. Sauran	Hak Pakai			Sauran Ronggo 1	Kebak
7	Tanah Bangunan	01.01.11.07.03	0006	25.400,00	2002	Kel. Sauran	Hak Pakai			Sauran Ronggo 2	Kebak
8	Tanah Bangunan	01.01.11.07.03	0007	6.995,40	2002	Kel. Sauran	Hak Pakai			Sauran Ronggo 3	Kebak
9	Tanah Bangunan	01.01.11.07.03	0008	19.809,70	2002	Kel. Sauran	Hak Pakai			Sauran Ronggo 4	Kebak
10	Tanah Bangunan	01.01.11.07.03	0009	7.750,00	2002	Kel. Sauran	Hak Pakai			Sauran Ronggo 5	Kebak
11	Tanah Bangunan	01.01.11.07.03	0010	2.016,00	2002	Kel. Sauran	Hak Pakai			Sauran Ronggo 6	Kebak
12	Tanah Bangunan	01.01.11.07.03	0011	6.195,00	2002	Kel. Sauran	Hak Pakai			Sauran Ronggo 7	Kebak
13	Tanah Bangunan	01.01.11.07.03	0012	3.442,50	2002	Kel. Sauran	Hak Pakai			Sauran Ronggo 8	Kebak
14	Tanah Bangunan	01.01.11.07.03	0013	1.465,00	2002	Kel. Sauran	Hak Pakai			Sauran Ronggo 9	Kebak
15	Tanah Bangunan	01.01.11.07.03	0014	3.645,00	2002	Kel. Sauran	Hak Pakai			Sauran Ronggo 10	Kebak
16	Tanah Bangunan	01.01.11.07.03	0015	1.698,50	2002	Kel. Sauran	Hak Pakai			Sauran Ronggo 11	Kebak
17	Tanah Bangunan	01.01.11.07.03	0016	633,00	2002	Kel. Sauran	Hak Pakai			Sauran Ronggo 12	Kebak
18	Tanah Bangunan	01.01.11.07.03	0017	688,00	2002	Kel. Sauran	Hak Pakai			Sauran Ronggo 13	Kebak
19	Tanah Bangunan	01.01.11.07.03	0018	8.005,00	2002	Kel. Sauran	Hak Pakai			Sauran Ronggo 14	Kebak
20	Tanah Bangunan	01.01.11.07.03	0019	244,60	2002	Kel. Sauran	Hak Pakai			Sauran Ronggo 15	Kebak
21	Tanah Bangunan	01.01.11.07.03	0020	2.098,00	2002	Kel. Sauran	Hak Pakai			Sauran Ronggo 16	Kebak
22	Tanah Bangunan	01.01.11.07.03	0021	1.564,60	2002	Kel. Sauran	Hak Pakai			Sauran Ronggo 17	Kebak
23	Tanah Bangunan	01.01.11.07.03	0022	3.447,60	2002	Kel. Sauran	Hak Pakai			Sauran Ronggo 18	Kebak
24	Tanah Bangunan	01.01.11.07.03	0023	812,75	2002	Kel. Sauran	Hak Pakai			Sauran Ronggo 19	Kebak
25	Tanah Bangunan	01.01.11.07.03	0024	694,00	2002	Kel. Sauran	Hak Pakai			Sauran Ronggo 20	Kebak
26	Tanah Bangunan	01.01.11.07.03	0025	14.458,00	2002	Kel. Sauran	Hak Pakai			Sauran Ronggo 21	Kebak
27	Tanah Bangunan	01.01.11.07.03	0026	17.478,00	2002	Kel. Sauran	Hak Pakai			Sauran Ronggo 22	Kebak
28	Tanah Bangunan	01.01.11.07.03	0027	4.991,00	2002	Kel. Sauran	Hak Pakai			Sauran Ronggo 23	Kebak
29	Tanah Bangunan	01.01.11.07.03	0028	14.188,00	2002	Kel. Sauran	Hak Pakai			Sauran Ronggo 24	Kebak
30	Tanah Bangunan	01.01.11.07.03	0029	4.141,00	2002	Kel. Sauran	Hak Pakai			Sauran Ronggo 25	Kebak
31	Tanah Bangunan	01.01.11.07.03	0030	8.970,00	2002	Kel. Sauran	Hak Pakai			Sauran Ronggo 26	Kebak
32	Tanah Bangunan	01.01.11.07.03	0031	13.466,00	2002	Kel. Sauran	Hak Pakai			Sauran Ronggo 27	Kebak
33	Tanah Bangunan	01.01.11.07.03	0032	2.215,00	2002	Kel. Sauran	Hak Pakai			Sauran Ronggo 28	Kebak
34	Tanah Bangunan	01.01.11.07.03	0033	11.667,00	2002	Kel. Sauran	Hak Pakai			Sauran Ronggo 29	Kebak
35	Tanah Bangunan	01.01.11.07.03	0034	14.660,00	2002	Kel. Sauran	Hak Pakai			Sauran Ronggo 30	Kebak
36	Tanah Bangunan	01.01.11.07.03	0035	176.627,00	2002	Kel. Sauran	Hak Pakai			Sauran Ronggo 31	Kebak
37	Tanah Bangunan	01.01.11.07.03	0036	1.444,00	2002	Kel. Sauran	Hak Pakai			Sauran Ronggo 32	Kebak
38	Tanah Bangunan	01.01.11.07.03	0037	1.100,00	2002	Kel. Sauran	Hak Pakai			Sauran Ronggo 33	Kebak
39	Tanah Bangunan	01.01.11.07.03	0038	41.917,00	2002	Kel. Sauran	Hak Pakai			Sauran Ronggo 34	Kebak
40	Tanah Bangunan	01.01.11.07.03	0039								
41	Tanah Bangunan	01.01.11.07.03	0040								

Dokumen KIB A (Kartu Inventaris Barang Tanah)

REKAMITILASI KARTU INVENTARIS BARANG MIKRO CECUHO DAN KARDIUMAN

PROVINSI JAWA TIMUR
KOTA MALANG
Badan Korpri/Korpri
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
12.13.02.05.01.01.00

Koordinat	No ur	Kendala	Luar	Dokumen	Monor	No. Jmbh	Letak, atau	Luas	Height	Agal	Status	Volume	Kods	Height
1	Bangunan Gedung Kantor Pemman	03.11.01.01.01.0001	Bak	0	Bangun	4002	Jl. Letjen Supriatno No 17	311220205	11	52	13	18	15	13.726.471.000.01
2	Bangunan Gedung Kantor Pemman	03.11.01.01.01.0002	Bak	1000	Bangun	4102	Jl. Pahlawan	311220206	11	52	13	18	15	28.300.000.02
3	Bangunan Gedung Kantor Pemman	03.11.01.01.01.0003	Bak	1000	Bangun	4102	Jl. Pahlawan	311220207	11	52	13	18	15	13.540.000.03
4	Bangunan Gedung Kantor Pemman	03.11.01.01.01.0004	Bak	1000	Bangun	4102	Jl. Pahlawan	311220208	11	52	13	18	15	14.020.000.04
5	Bangunan Gedung Kantor Pemman	03.11.01.01.01.0005	Bak	1000	Bangun	4102	Jl. Pahlawan	311220209	11	52	13	18	15	48.110.000.05
6	Bangunan Gedung Kantor Pemman	03.11.01.01.01.0006	Bak	1000	Bangun	4102	Jl. Pahlawan	311220210	11	52	13	18	15	81.210.000.06
7	Bangunan Gedung Kantor Pemman	03.11.01.01.01.0007	Bak	1000	Bangun	4102	Jl. Pahlawan	311220211	11	52	13	18	15	134.820.000.07
8	Bangunan Gedung Kantor Pemman	03.11.01.01.01.0008	Bak	1000	Bangun	4102	Jl. Pahlawan	311220212	11	52	13	18	15	69.280.000.08
9	Bangunan Gedung Kantor Pemman	03.11.01.01.01.0009	Bak	1000	Bangun	4102	Jl. Pahlawan	311220213	11	52	13	18	15	71.687.000.09
10	Bangunan Gedung Kantor Pemman	03.11.01.01.01.0010	Bak	1000	Bangun	4102	Jl. Pahlawan	311220214	11	52	13	18	15	62.475.000.10
11	Bangunan Gedung Kantor Pemman	03.11.01.01.01.0011	Bak	1000	Bangun	4102	Jl. Pahlawan	311220215	11	52	13	18	15	38.205.000.11
12	Bangunan Gedung Kantor Pemman	03.11.01.01.01.0012	Bak	1000	Bangun	4102	Jl. Pahlawan	311220216	11	52	13	18	15	71.835.000.12
13	Bangunan Gedung Kantor Pemman	03.11.01.01.01.0013	Bak	1000	Bangun	4102	Jl. Pahlawan	311220217	11	52	13	18	15	43.005.000.13
14	Bangunan Gedung Kantor Pemman	03.11.01.01.01.0014	Bak	1000	Bangun	4102	Jl. Pahlawan	311220218	11	52	13	18	15	82.005.000.14
15	Bangunan Gedung Kantor Pemman	03.11.01.01.01.0015	Bak	1000	Bangun	4102	Jl. Pahlawan	311220219	11	52	13	18	15	50.000.000.15
16	Bangunan Gedung Kantor Pemman	03.11.01.01.01.0016	Bak	1000	Bangun	4102	Jl. Pahlawan	311220220	11	52	13	18	15	84.950.000.16
17	Bangunan Gedung Kantor Pemman	03.11.01.01.01.0017	Bak	1000	Bangun	4102	Jl. Pahlawan	311220221	11	52	13	18	15	57.740.000.17
18	Bangunan Gedung Kantor Pemman	03.11.01.01.01.0018	Bak	1000	Bangun	4102	Jl. Pahlawan	311220222	11	52	13	18	15	236.150.000.18
19	Bangunan Gedung Kantor Pemman	03.11.01.01.01.0019	Bak	1000	Bangun	4102	Jl. Pahlawan	311220223	11	52	13	18	15	31.084.000.19
20	Bangunan Gedung Kantor Pemman	03.11.01.01.01.0020	Bak	1000	Bangun	4102	Jl. Pahlawan	311220224	11	52	13	18	15	23.272.000.20
21	Bangunan Gedung Kantor Pemman	03.11.01.01.01.0021	Bak	1000	Bangun	4102	Jl. Pahlawan	311220225	11	52	13	18	15	94.165.000.21
22	Bangunan Gedung Kantor Pemman	03.11.01.01.01.0022	Bak	1000	Bangun	4102	Jl. Pahlawan	311220226	11	52	13	18	15	2.070.893.000.22
23	Bangunan Gedung Kantor Pemman	03.11.01.01.01.0023	Bak	1000	Bangun	4102	Jl. Pahlawan	311220227	11	52	13	18	15	1.044.165.000.23
24	Bangunan Gedung Kantor Pemman	03.11.01.01.01.0024	Bak	1000	Bangun	4102	Jl. Pahlawan	311220228	11	52	13	18	15	1.023.537.000.24
25	Bangunan Gedung Kantor Pemman	03.11.01.01.01.0025	Bak	1000	Bangun	4102	Jl. Pahlawan	311220229	11	52	13	18	15	1.604.520.100.25
26	Bangunan Gedung Kantor Pemman	03.11.01.01.01.0026	Bak	1000	Bangun	4102	Jl. Pahlawan	311220230	11	52	13	18	15	2.001.108.000.26
27	Bangunan Gedung Kantor Pemman	03.11.01.01.01.0027	Bak	1000	Bangun	4102	Jl. Pahlawan	311220231	11	52	13	18	15	2.883.313.000.27
28	Bangunan Gedung Kantor Pemman	03.11.01.01.01.0028	Bak	1000	Bangun	4102	Jl. Pahlawan	311220232	11	52	13	18	15	250.088.000.28
29	Bangunan Gedung Kantor Pemman	03.11.01.01.01.0029	Bak	1000	Bangun	4102	Jl. Pahlawan	311220233	11	52	13	18	15	354.448.000.29
30	Bangunan Gedung Kantor Pemman	03.11.01.01.01.0030	Bak	1000	Bangun	4102	Jl. Pahlawan	311220234	11	52	13	18	15	485.028.000.30
31	Bangunan Gedung Kantor Pemman	03.11.01.01.01.0031	Bak	1000	Bangun	4102	Jl. Pahlawan	311220235	11	52	13	18	15	317.090.000.31
32	Bangunan Gedung Kantor Pemman	03.11.01.01.01.0032	Bak	1000	Bangun	4102	Jl. Pahlawan	311220236	11	52	13	18	15	38.500.000.32
33	Bangunan Gedung Kantor Pemman	03.11.01.01.01.0033	Bak	1000	Bangun	4102	Jl. Pahlawan	311220237	11	52	13	18	15	1.508.400.000.33
34	Bangunan Gedung Kantor Pemman	03.11.01.01.01.0034	Bak	1000	Bangun	4102	Jl. Pahlawan	311220238	11	52	13	18	15	424.714.000.34
35	Bangunan Gedung Kantor Pemman	03.11.01.01.01.0035	Bak	1000	Bangun	4102	Jl. Pahlawan	311220239	11	52	13	18	15	1.116.000.35
36	Bangunan Gedung Kantor Pemman	03.11.01.01.01.0036	Bak	1000	Bangun	4102	Jl. Pahlawan	311220240	11	52	13	18	15	8.738.180.000.36
37	Bangunan Gedung Kantor Pemman	03.11.01.01.01.0037	Bak	1000	Bangun	4102	Jl. Pahlawan	311220241	11	52	13	18	15	1.510.040.000.37
38	Bangunan Gedung Kantor Pemman	03.11.01.01.01.0038	Bak	1000	Bangun	4102	Jl. Pahlawan	311220242	11	52	13	18	15	80.872.000.38
39	Bangunan Gedung Kantor Pemman	03.11.01.01.01.0039	Bak	1000	Bangun	4102	Jl. Pahlawan	311220243	11	52	13	18	15	150.851.000.39
40	Bangunan Gedung Kantor Pemman	03.11.01.01.01.0040	Bak	1000	Bangun	4102	Jl. Pahlawan	311220244	11	52	13	18	15	
41	Bangunan Gedung Kantor Pemman	03.11.01.01.01.0041	Bak	1000	Bangun	4102	Jl. Pahlawan	311220245	11	52	13	18	15	

Dokumen KIB C (Kartu Inventaris Barang Gedung dan Bangunan)

PROVINSI JAWA TIMUR
KOTA MAOLAN
Bidang Kemasyarakatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
12.10.32.03.01.01.00

KARTU INVENTARIS BARANG (MELI DALAM) BERGAS DAM JARINGAN

No	Daerah	No. Urut	No. Kode	No. Nama Barang	Konstruksi	Peringkat (Km)	Lebar (M)	Luas (M ²)	Letak/Lokasi	Asal-usul	Kondisi (B, KB, RB)	Keterangan
1	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.01	0001	Hortik	1.700	16	27.200	Jl. Uluh Sunoro	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	1.190.160.355,00
2	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.01	0002	Hortik	1.200	10	12.000	Jl. A. Yuni	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	755.774.074,00
3	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.01	0003	Hortik	990	14	7.246	Jl. Prahawan	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	1.225.194.000,00
4	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.01	0004	Hortik	2.340	16	37.440	Jl. Yea Sudirman	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	1.840.995.801,00
5	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.01	0005	Hortik	1.770	10	17.700	Jl. Bawid Rachmad	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	1.876.476.256,00
6	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.01	0006	Hortik	840	10	6.400	Jl. S. Purnama	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	725.626.579,00
7	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.01	0007	Hortik	960	10	9.600	Jl. Tharzan	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	548.152.700,00
8	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.01	0008	Hortik	1.240	10	12.400	Jl. Lelend, Hengono	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	763.325.250,00
9	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.01	0009	Hortik	1.730	10	17.300	Jl. Ledend, Peralihan	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	1.816.228.450,00
10	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.01	0010	Hortik	990	10	10.980	Jl. Transoyo	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	1.489.230.227,00
11	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.01	0011	Hortik	990	10	10.980	Jl. H. Agus Salim	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	1.489.230.227,00
12	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.01	0012	Hortik	1.400	10	22.400	Jl. Susanto Haris	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	6.273.984.756,00
13	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.01	0013	Hortik	1.870	10	18.700	Jl. Maydani, Sangkoro	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	1.941.791.299,00
14	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.01	0014	Hortik	0	4	187				Hbaik	988.716.483,00
15	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.01	0015	Hortik	150	3	450	Jl. Mangunrejo X (LII)	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	212.235.000,00
16	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.04	0016	Hortik	3.160	3	8.459	Jl. Pangs, Vranca	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	7.200.000,00
17	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.04	0017	Hortik	300	3	900	Jl. Masjo Gading	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	243.282.560,00
18	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.04	0018	Hortik	5.300	3	84.300	Jl. Pangs, Bawid	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	8.600.000,00
19	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.05	0019	Hortik	280	3	870	Jl. Pangs, Bawid	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	24.190.440.419,00
20	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.05	0020	Hortik	210	3	630	Jl. Rawa Bawid	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	929.816.584,00
21	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.05	0021	Hortik	600	3	1.800	Jl. Bawid, Yuni	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	141.720.000,00
22	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.05	0022	Hortik	200	4	800	Jl. Holidan	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	28.800.000,00
23	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.06	0023	Hortik	475	3	1.425	Jl. Rawa, Mulya	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	13.800.000,00
24	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.06	0024	Hortik	290	3	755	Jl. Gana	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	465.510.534,00
25	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.06	0025	Hortik	400	3	1.200	Jl. Permas Hilir	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	134.707.000,00
26	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.05	0026	Hortik	500	6	3.000	Jl. Limbung Sari Rany	31/12/1992	Tanah Negara	Pembelian	18.200.000,00
27	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.05	0027	Hortik	920	6	5.520	Jl. Bat	31/12/1992	Tanah Negara	Pembelian	48.000.000,00
28	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.06	0028	Hortik	750	7	5.250	Jl. Wotanari	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	1.115.187.000,00
29	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.06	0029	Hortik	500	6	3.000	Jl. Rawa, Kupa	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	1.790.635.400,00
30	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.06	0030	Hortik	625	6	3.750	Jl. Rawa, Dama	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	1.563.247.475,00
31	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.06	0031	Hortik	800	6	4.800	Jl. Sri Rejeki	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	623.045.000,00
32	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.06	0032	Hortik	1.150	4	4.600	Jl. Srib, Makmur	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	4.520.454.434,00
33	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.06	0033	Hortik	3.150	4	12.600	Jl. Pangs, Banga	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	2.929.299.316,00
34	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.06	0034	Hortik	789	4	3.156	Jl. Pangs, AWD	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	201.800.000,00
35	Jalan Kabupaten Kelas II	04.13.01.03.06	0035	Hortik	789	4	3.156	Jl. Pangs, AWD	31/12/1992	Tanah Negara	Hbaik	574.413.969,00

BKPD
KABUPATEN
MADURA
PROVINSI

DINAS PERBERKAAH UMUM DAN TATA RUANG KOTA MADURA
MADURA
JAWA TIMUR

DAFTAR BARANG BAKU YANG AKAN DIHAPUS

Lampiran 1

NO	NAMA BARANG	NO. KODE BARANG	NOMOR REGISTRASI	NO. KODE LOKASI	WARRANTY	LOKUCI KEPERLUAN	TAHUN BELI/ PERSILAHAN	JUMLAH BARANG	NILAI BERTAKSIR BARANG (Rp)	NILAI TOTAL PENOLAKAN BARANG (Rp)	HEADKAM BARANG (Rp, Kt, Rp)	KETERANGAN
1	Kursi busan	02.08.02.01.30	1793 dan 1795	12.13.05.05.01.01.01	-	-	2002	3	1.024.000	3.072.000	Rp	
		02.08.02.01.30	1796 dan 1797	12.13.05.05.01.01.01	-	-	2008	2	880.000	1.760.000	Rp	
		02.08.02.01.30	3079	12.13.05.05.01.01.01	-	-	2003	1	3.000.000	3.000.000	Rp	
2	Printer	02.06.01.04.03	3128 dan 3127	12.13.05.05.01.01.01	Spesimen	-	2012	2	668.750	1.337.500	Rp	
		02.06.01.04.03	3202	12.13.05.05.01.01.01	Spesimen	-	2014	1	3.160.000	3.160.000	Rp	
		02.06.01.04.03	3206 dan 3208	12.13.05.05.01.01.01	Spesimen	-	2014	4	1.787.500	7.150.000	Rp	
		02.06.01.04.03	3247 dan 3248	12.13.05.05.01.01.01	Spesimen	-	2013	2	3.271.000	6.542.000	Rp	
		02.06.01.04.03	3250 dan 3253	12.13.05.05.01.01.01	Spesimen	-	2013	4	1.108.500	4.434.000	Rp	
		02.06.01.04.03	3241 dan 3246	12.13.05.05.01.01.01	Spesimen	-	2013	6	999.500	5.973.000	Rp	
		02.06.01.04.03	3252 dan 3245	12.13.05.05.01.01.01	Spesimen	-	2009	3	2.038.000	6.114.000	Rp	
		02.06.03.05.03	2872 dan 2873	12.13.05.05.01.01.01	Spesimen	-	2002	2	344.000	1.088.000	Rp	
		02.06.03.05.03	2874	12.13.05.05.01.01.01	Spesimen	-	2005	1	399.000	399.000	Rp	
		02.06.03.05.03	2875	12.13.05.05.01.01.01	Spesimen	-	2005	1	2.090.000	2.090.000	Rp	
		02.06.03.05.03	2000	12.13.05.05.01.01.01	Spesimen	-	2008	1	14.388.000	14.388.000	Rp	
		02.06.03.05.03	2871	12.13.05.05.01.01.01	Spesimen	-	2005	1	897.000	897.000	Rp	
		02.06.03.05.03	1845	12.13.05.05.01.01.01	Spesimen	-	2003	1	2.970.000	2.970.000	Rp	
		02.06.03.05.03	2895 dan 2891	12.13.05.05.01.01.01	Spesimen	-	2009	7	1.840.000	12.980.000	Rp	
		02.06.03.05.03	2892	12.13.05.05.01.01.01	Spesimen	-	2005	4	1.840.000	7.360.000	Rp	
		02.06.03.05.03	2893	12.13.05.05.01.01.01	Spesimen	-	2008	1	1.750.000	1.750.000	Rp	
		02.06.03.05.03	2894	12.13.05.05.01.01.01	Spesimen	-	2008	1	1.760.000	1.760.000	Rp	
		02.06.03.05.03	2895	12.13.05.05.01.01.01	Spesimen	-	2009	1	3.040.000	3.040.000	Rp	
		02.06.03.05.03	2896	12.13.05.05.01.01.01	Spesimen	-	2013	3	8.654.500	25.463.500	Rp	
		02.06.03.05.03	2917	12.13.05.05.01.01.01	Spesimen	-	2008	1	478.970	478.970	Rp	
		02.06.03.05.03	3033 dan 3038	12.13.05.05.01.01.01	Spesimen	-	2008	4	14.478.750	57.915.000	Rp	
		02.06.03.05.03	3374 dan 3216	12.13.05.05.01.01.01	Spesimen	-	2013	3	11.965.000	35.895.000	Rp	
		02.06.03.05.03	2919 dan 2915	12.13.05.05.01.01.01	Spesimen	-	2008	4	31.000	124.000	Rp	
		02.06.03.05.03	1901 dan 1914	12.13.05.05.01.01.01	Spesimen	-	2004	44	148.500	6.601.000	Rp	
		02.06.03.05.03	228 dan 233	12.13.05.05.01.01.01	Spesimen	-	2005	4	328.000	1.312.000	Rp	
		02.06.03.05.03	460 dan 490	12.13.05.05.01.01.01	Spesimen	-	2009	21	355.000	7.360.000	Rp	
		02.06.03.05.03	1798 dan 1792	12.13.05.05.01.01.01	Spesimen	-	2008	9	88.000	230.000	Rp	

Dokumen Daftar Barang yang akan dihapus

Nama Kegiatan	Paket Pekerjaan (Unit Honor)	Paket Pekerjaan (Unit Berd)	NAMA UTK	PANGKAT GELONGGAM	NIP	JABATAN
1. Perawatan Bangunan dan lingkungan	PERAWATAN PERBANGUNAN SAUJUKAN LINDOKAN DAN KELILING SAUJUKAN	Perawatan Perbaikan Sauruk LINDOKAN Lingkungan Keliling Sauruk	BUDI ADJANG WICAKSONO, ST	Pangkat Tngkat I	19790029 200312 1 003	KEPALA BIDANG CIPTA KARYA
2. Perawatan Bangunan dan lingkungan	PERAWATAN PERBANGUNAN SAUJUKAN LINDOKAN KELILING SAUJUKAN	Perawatan Perbaikan Sauruk LINDOKAN Lingkungan Keliling Sauruk	BUDI ADJANG WICAKSONO, ST	Pangkat Tngkat I	19790029 200312 1 003	KEPALA BIDANG CIPTA KARYA
3. Perawatan Bangunan dan lingkungan	PERAWATAN PERBANGUNAN SAUJUKAN LINDOKAN KELILING RANOSAMPAN	Perawatan Perbaikan Sauruk LINDOKAN Lingkungan Keliling RANOSAMPAN	BUDI ADJANG WICAKSONO, ST	Pangkat Tngkat I	19790029 200312 1 003	KEPALA BIDANG CIPTA KARYA
4. Perawatan Bangunan dan lingkungan	PERAWATAN PERBANGUNAN SAUJUKAN LINDOKAN KELILING KUNCIAN	Perawatan Perbaikan Sauruk LINDOKAN Lingkungan Keliling KUNCIAN	BUDI ADJANG WICAKSONO, ST	Pangkat Tngkat I	19790029 200312 1 003	KEPALA BIDANG CIPTA KARYA
5. Perawatan Bangunan dan lingkungan	PERAWATAN PERBANGUNAN SAUJUKAN LINDOKAN RT. 4/1-RT.4/20 DAN YAMWASAM PERUM BEL. PANDEAN	Perawatan Perbaikan Sauruk LINDOKAN RT. 4/1-RT.4/20 dan Perumahan Perum BEL. PANDEAN	BUDI ADJANG WICAKSONO, ST	Pangkat Tngkat I	19790029 200312 1 003	KEPALA BIDANG CIPTA KARYA
6. Perawatan Bangunan dan lingkungan	PERAWATAN PERBANGUNAN SAUJUKAN LINDOKAN KELILING KEMAN	Perawatan Perbaikan Sauruk LINDOKAN Lingkungan Keliling KEMAN	BUDI ADJANG WICAKSONO, ST	Pangkat Tngkat I	19790029 200312 1 003	KEPALA BIDANG CIPTA KARYA
7. Perawatan Bangunan dan lingkungan	PERAWATAN PERBANGUNAN SAUJUKAN LINDOKAN KELILING KANDISAN	Perawatan Perbaikan Sauruk LINDOKAN Lingkungan Keliling KANDISAN	BUDI ADJANG WICAKSONO, ST	Pangkat Tngkat I	19790029 200312 1 003	KEPALA BIDANG CIPTA KARYA
8. Perawatan Bangunan dan lingkungan	PERAWATAN PERBANGUNAN SAUJUKAN LINDOKAN KELILING YAMWASAM	Perawatan Perbaikan Sauruk LINDOKAN Lingkungan Keliling YAMWASAM	BUDI ADJANG WICAKSONO, ST	Pangkat Tngkat I	19790029 200312 1 003	KEPALA BIDANG CIPTA KARYA
9. Perawatan Bangunan dan lingkungan	PERAWATAN PERBANGUNAN SAUJUKAN LINDOKAN KELILING PERUM BEL. PANDEAN	Perawatan Perbaikan Sauruk LINDOKAN Lingkungan Keliling Perumahan	BUDI ADJANG WICAKSONO, ST	Pangkat Tngkat I	19790029 200312 1 003	KEPALA BIDANG CIPTA KARYA

Dokumen Daftar Pengawasan Barang